



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Gedung Baru Lantai 3-8
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10170

Telepon (021) 3858001
Fax. (021) 3857917
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

SIARAN PERS

PELAKSANAAN WORKSHOP ENHANCING FINANCIAL ACCESSIBILITY FOR SMEs

Sebagai salah satu bentuk upaya Bapepam-LK untuk meningkatkan akses dan aktualisasi potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam memanfaatkan pasar modal sebagai sarana pembiayaan dan meningkatkan peran UKM dalam sistem keuangan, maka pada tanggal 29 s/d 30 Januari 2008, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) menyelenggarakan sebuah workshop dengan thema *Enhancing Financial Accessibility for SMEs*. Sambutan Ketua Bapepam-LK dalam workshop tersebut dibacakan oleh Kepala Biro Penilaian Keuangan Sektor Riil, Nurhaida, yang hadir mewakili Ketua Bapepam-LK.

Workshop ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa UKM adalah elemen utama perekonomian Indonesia, mengingat mayoritas dari jumlah total perusahaan dan usaha di Indonesia adalah masuk kategori Usaha Kecil dan Menengah serta kelompok ini juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDB Indonesia, tetapi kelompok ini belum secara optimal memanfaatkan dan mendapatkan akses pembiayaan dari sistem keuangan formal. Berdasarkan fakta tersebut, maka workshop ini difokuskan untuk membahas bagaimana meningkatkan keterlibatan UKM dalam sistem keuangan serta hubungannya dengan stabilitas ekonomi makro di Indonesia.

Dalam workshop tersebut dibahas 4 (empat) isu pokok, yaitu: 1) Kebijakan dan Kondisi UKM di Indonesia; 2) Sistem Penjaminan Kredit dan Pembiayaan UKM; 3) Potensi Pembiayaan UKM Melalui Pasar Modal; dan 4) Pengawasan dan Regulasi Pasar. Workshop tersebut dihadiri oleh sekitar 150 peserta yang berasal dari regulator (Bapepam-LK, Bank Indonesia, Departemen Perindustrian, dan Kementerian Koperasi dan UKM), akademisi, dan pihak swasta (BEI, PT. Askrindo, PT. Sarana Pengembangan Usaha, dan asosiasi/organisasi terkait dengan sektor UKM di tanah air seperti KUKMI, APINDO, AUMI, HIMPI, ATSIRI, dan lainnya) dengan pimpinan workshop (*chairperson*) Dr. Nining Soesilo, Direktur UKM Center FEUI.

Beberapa substansi yang dibahas dalam workshop tersebut antara lain:

Sesi I : Kondisi UKM di Indonesia

- UKM merupakan kelompok pelaku dunia usaha yang penting dalam perekonomian Indonesia, mengingat 99% dari total jumlah pelaku dunia usaha/perusahaan di Indonesia merupakan kelompok UKM dan kelompok ini menyumbang lebih dari 50% PDB;
- Saat ini UKM belum diberdayakan secara optimal dalam rangka pengurangan tingkat pengangguran di Indonesia, mengingat masih rendahnya pertumbuhan UKM;
- UKM masih menghadapi kendala untuk mendapatkan pembiayaan dari sektor keuangan formal.

Sesi 2 : Sistem Penjaminan Kredit dan Pembiayaan UKM

- Pengembangan industri pembiayaan yang ramah bagi UKM perlu mendapat perhatian khusus dan menjadi prioritas mengingat hanya sekitar 30% UKM yang mampu mengakses pinjaman dari perbankan;
- Kendala pendanaan UKM berasal dari internal UKM sendiri maupun hal-hal tertentu dalam sistem keuangan;
- Sistem penjaminan kredit dan pembiayaan sangat penting, khususnya bagi UKM yang memiliki risiko yang tinggi.
- Pinjaman Beragun Aset dan Efek Beragun Aset (EBA) dapat dipertimbangkan sebagai alternatif pembiayaan di industri keuangan Indonesia, metode tersebut dinilai cukup baik dalam rangka pengelolaan risiko oleh UKM.

Sesi 3 : Potensi Pembiayaan UKM melalui Pasar Modal

- Diversifikasi alternatif pembiayaan bagi perusahaan dan UKM dinilai perlu untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi di pasar keuangan;
- Pembangunan infrastruktur pembiayaan langsung yang baik bagi UKM melalui pasar modal sangat dibutuhkan. Untuk itu, perlu dibuka pasar khusus untuk UKM yang terpisah dari pasar regular dengan berbagai kemudahan dengan mempertimbangkan skala usaha UKM.
- Perlu dibangun mekanisme pembiayaan melalui pasar modal yang mampu mendorong pertumbuhan UKM dan perkembangan industri keuangan Indonesia.

Sesi 4 : Pengaturan dan Pengawasan Pasar.

- Pengembangan industri pembiayaan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi UKM tidak akan dapat tercapai secara maksimal bila dilakukan tanpa adanya infrastruktur pasar yang memadai.
- Dalam rangka menciptakan pasar yang menarik bagi investor, kualitas dan keterbukaan pasar perlu lebih ditingkatkan, terkait dengan hal ini, pendekatan regulasi dan pengawasan bagi sektor UKM tidak boleh dibedakan dengan perusahaan yang lainnya, tetapi tetap mempertimbangkan beberapa kemudahan seperti insentif pajak tanpa harus mengorbankan sistem penegakan hukum, penerapan prinsip GCG, serta keterbukaan informasi;
- Sistem penjaminan kredit dan pembiayaan publik memberikan kesempatan bagi keterlibatan UKM dalam sistem keuangan nasional, dalam hal ini penguatan mekanisme pengawasan merupakan suatu prasyarat untuk pelaksanaan skema ini dengan baik.

a.n. Ketua
Sekretaris Badan,

ttd

Ngalm Sawega
NIP 060047834